



POTENSI EKONOMI BIRU UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Masyithah Aulia Adhiem*

Abstrak

Ekonomi biru menyediakan banyak potensi untuk menopang penguatan ketahanan nasional. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang berasal dari sektor perikanan tangkap dan budidaya yang merupakan bagian dari ekonomi biru. Tulisan ini mengelaborasi peran ekonomi biru dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional. Selain itu juga memberikan alternatif kebijakan untuk mendukungnya. Ekonomi biru berperan mendukung diversifikasi pangan, terutama sebagai pangan yang bergizi. Selain itu juga sebagai alternatif pangan ketika banyak ancaman terhadap produksi pangan berbasis lahan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi biru yang sudah berjalan, maka dapat didorong penerapan kebijakan yang mendorong penggunaan sumber daya laut dalam kebijakan pangan nasional, hilirisasi produk perikanan, konservasi ekosistem laut, serta tidak kalah penting adalah sinergi antar pemangku kepentingan tanpa mengesampingkan peran masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Komisi IV DPR RI perlu memastikan prinsip ekonomi biru menjadi bagian dari rencana perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Komisi IV DPR RI dapat mengundang atau mengadakan rapat kerja dengan mitra kerja terkait untuk menyinergikan dan menyelaraskan kebijakan yang ada, serta memastikan kecukupan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan.

Pendahuluan

Target pencapaian swasembada pangan nasional pada tahun 2027 membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor, sedangkan fokus strategi pengembangan pangan masih bertumpu pada sektor berbasis lahan. Ketergantungan pada sumber pangan darat menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari degradasi lahan, ketersediaan air yang terbatas, hingga dampak perubahan iklim. Beberapa tantangan yang ada saat ini, seperti perubahan iklim dan konflik global banyak memberikan dampak pada sektor tersebut. Misalnya adanya kemarau basah yang mengancam produksi sektor pertanian akan berdampak pada pasokan pangan nasional (“Kemarau Basah Ancam Ketahanan Pangan”, 2025). Jika kita lihat kembali tujuan utama swasembada pangan, maka bukan sebatas memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri, melainkan menjaga keberlanjutan sumber-sumber pangan yang ada, yang artinya termasuk di sektor kelautan dan perikanan.

Laut, dengan keanekaragaman hayatinya, menawarkan potensi besar untuk diversifikasi sumber pangan. Ekonomi biru muncul sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan yang menjanjikan, khususnya dalam konteks ketahanan pangan bersumber dari sektor kelautan dan perikanan (“Mengembangkan Ekonomi Biru”, 2025). Ekonomi biru, termasuk di

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: masyithah.adhiem@dpr.go.id

dalamnya sumber daya kelautan dan perikanan, dapat menjadi sarana optimalisasi kebijakan pencapaian ketahanan pangan melalui penyediaan sumber protein alternatif (Munir, 2025). Tulisan ini mengelaborasi peran ekonomi biru dalam mendukung berbagai kebijakan ketahanan pangan nasional yang telah dicanangkan. Selain itu juga memberikan alternatif kebijakan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekonomi biru Indonesia.

Potensi Ekonomi Biru Indonesia dalam Menopang Ketahanan Pangan

Di tengah upaya pencapaian ketahanan pangan, potensi ekonomi biru Indonesia, yang mencakup pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, turut berkontribusi penting. Ekonomi biru juga menjadi salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mewujudkan transformasi ekonomi. Ekonomi biru didefinisikan sebagai pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan kesehatan atau keberlanjutan ekosistem laut. Lebih dari sekadar eksploitasi, ekonomi biru menekankan inovasi, efisiensi, dan nilai tambah dari produk dan jasa kelautan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut (World Bank, 2017). Adapun pangan biru mengacu pada sumber pangan yang berasal dari laut seperti ikan, rumput laut, kerang, dan mikroalga yang memiliki kandungan gizi tinggi serta berperan dalam pengentasan malnutrisi (Munir, 2025).

Berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2021, ikan dan hasil laut lainnya merupakan salah satu sumber protein utama. Melalui penerapan ekonomi biru dalam pengelolaan sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap dan budidaya, dapat memberikan kontribusi langsung yang signifikan terhadap ketersediaan pangan, terutama sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi (Munir, 2025). Pemanfaatan ekonomi biru sebagai sumber gizi sejalan upaya diversifikasi pangan yang didukung dengan tingginya nilai kandungan gizi berbagai komoditas laut dan perairan darat. Ikan dan hasil laut lainnya merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi yang kaya akan asam lemak omega-3 (DHA dan EPA), vitamin (A, D, B12), dan mineral penting seperti yodium, selenium, zat besi, dan seng (Putri & Dzulfaroh, 2024).

Produksi perikanan tangkap pada semester I tahun 2024 mencapai 3,34 juta ton yang terdiri dari komoditas perairan laut dan darat (KKP, 2024). Selain itu, produksi berbagai komoditas perikanan di awal tahun 2025 juga diketahui mengalami peningkatan. Dengan kisaran produksi 22 - 24 juta ton per tahun, hasil perikanan dapat membantu menopang kebutuhan pangan biru domestik yang jumlahnya 13 juta ton per tahun ("Mengembangkan Ekonomi Biru", 2025). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pangan laut dapat menjadi alternatif penyediaan pangan di kala sektor pangan berbasis lahan mengalami berbagai ancaman yang ada, seperti risiko gagal panen, serta ancaman penyakit mulut dan kuku pada ternak yang umumnya banyak terjadi mendekati perayaan Iduladha.

Meski demikian, berbagai potensi tersebut tidak lepas dari berbagai ancaman, seperti *overfishing*, praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) serta penangkapan

ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) (Astuti & Utomo, 2025). Tantangan perubahan iklim juga turut mengancam sektor kelautan. Perairan Indonesia dilintasi oleh sirkulasi termohalin yang membuat wilayah perairan mudah menyerap dampak perubahan iklim global. Jika hal tersebut tidak diantisipasi, maka kerugian terhadap sektor kelautan sangat besar (Harianto, 2025).

Penguatan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Biru

Selain sebagai sumber pangan alternatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa potensi ekonomi biru Indonesia mencapai US\$1,33 miliar per tahun setara dengan lebih dari Rp20 triliun per tahun, dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja, terutama melalui sektor perikanan budidaya dan kampung perikanan berbasis komoditas lokal (Munir, 2025). Di luar berbagai kebijakan yang sudah diambil pemerintah untuk mengembangkan ekonomi biru Indonesia, selalu terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitasnya, khususnya terkait dengan perannya sebagai penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.

Pertama, mengedepankan produk perikanan dan kelautan dalam kebijakan tata kelola pangan nasional. Salah satu contohnya adalah mendorong penggunaan pangan laut sebagai salah satu menu dalam program makan bergizi gratis (MBG) mengingat pangan laut memiliki nutrisi yang tinggi. *Kedua*, hilirisasi produk perikanan untuk memberikan nilai tambah hasil perikanan dan juga mencegah praktik eksploitasi (Widiyatmaka, 2025). Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengedepankan riset serta dukungan infrastruktur perikanan. Selain ikan, laut Indonesia kaya akan biomassa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Saat ini masih sedikit penelitian yang secara spesifik meneliti bagaimana konsep ekonomi biru ini mendukung ketahanan pangan di daerah kepulauan. Sehingga, diharapkan pengetahuan yang lebih mendalam ini dapat memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan (Andaiyani, et al, 2024).

Ketiga, penguatan konservasi, pelindungan, dan restorasi ekosistem pesisir dan laut. Ekosistem seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun adalah "lambung" ikan dan biota laut. Ekonomi biru secara prinsip mengedepankan konservasi dan restorasi ekosistem yang merupakan fondasi bagi produktivitas laut. Hal tersebut merupakan bentuk mitigasi atas kegiatan *overfishing* dan *IUU fishing*. Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait perlu terus dilakukan untuk memastikan sumber daya laut digunakan secara lestari. Selain penangkapan ikan terukur, KKP juga telah merencanakan perluasan kawasan konservasi pesisir dan laut hingga 30 persen sebagai antisipasi terhadap lonjakan kebutuhan pangan dan tekanan ekologis (Astuti & Jatmiko, 2025). *Keempat* memperkuat sinergi dan kerja sama antara KKP dan kementerian/lembaga terkait lainnya, serta pemerintah daerah, untuk memaksimalkan implementasi kebijakan ekonomi biru dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, perlu juga dikedepankan peran masyarakat, terutama di wilayah pesisir sebagai aktor penting dalam penerapan prinsip ekonomi biru di Indonesia.

Penutup

Ekonomi biru memiliki peran strategis dan multidimensional dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional Indonesia dan berpotensi menopang perekonomian nasional. Penguatan perannya dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan yang mendorong penggunaan sumber daya laut dalam kebijakan pangan nasional, hilirisasi produk perikanan, konservasi ekosistem laut, serta tidak kalah penting adalah sinergi antar pemangku kepentingan tanpa mengesampingkan peran masyarakat, terutama masyarakat pesisir.

Komisi IV DPR RI yang menaungi bidang kelautan dan perikanan memegang peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada turut mengarusutamakan sektor kelautan dan perikanan dalam penerapan berbagai kebijakan pangan nasional. Salah satunya adalah dengan memastikan prinsip ekonomi biru menjadi bagian dari rencana perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Komisi IV DPR RI dapat mengundang atau mengadakan rapat kerja dengan mitra kerja terkait untuk menyinergikan dan menyelaraskan kebijakan yang ada, serta memastikan kecukupan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan.

Referensi

- Andaiyani, S., Marwa, T., & Nurhaliza, S. (2024). Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan: Studi Empiris Provinsi Kepulauan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(1), 69-85. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i1.324>
- Astuti, E. A., & Jatmiko, B. P. (2025, Mei 15). Konservasi laut jadi strategi KKP hadapi ancaman krisis pangan, *Kompas.com*, <https://lestari.kompas.com/read/2025/05/15/113341386/konservasi-laut-jadi-strategi-kkp-hadapi-ancaman-krisis-pangan>
- Astuti, E. A. & Utomo, Y. W. (2025, 25 Mei). Tangkap pelaku illegal fishing, KKP cegah kerugian Rp774 miliar, *Kompas.com*, <https://lestari.kompas.com/read/2025/05/25/110800586/tangkap-pelaku-illegal-fishing-kkp-cegah-kerugian-rp-774-miliar>.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN]. (2025, Maret 11). Melalui program SATREPS, BRIN kembangkan potensi rumput laut untuk ketahanan pangan. <https://brin.go.id/news/122523/melalui-program-satreps-brin-kembangkan-potensi-rumput-laut-untuk-ketahanan-pangan>
- Harianto, M. (2025, 22 Mei). KKP perluas konservasi laut cegah dampak perubahan iklim. *Antaranews.com*, <https://www.antaranews.com/berita/4852501/kkp-perluas-konservasi-laut-cegah-dampak-perubahan-iklim>
- Kemarau basah ancam ketahanan pangan, BMKG soroti risiko gagal panen. (2025, 16 Mei). *Kompas.tv*, <https://www.kompas.tv/nasional/593771/kemarau-basah-ancam-ketahanan-pangan-bmkg-soroti-risiko-gagal-panen?page=all>
- Mengembangkan Ekonomi Biru untuk Menopang Swasembada Pangan. (2025, 3 Januari). *News.detik.com*, <https://news.detik.com/kolom/d-7716738/mengembangkan-ekonomi-biru-untuk-menopang-swasembada-pangan>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]. (2024, Juli 27). Lampaui target, produksi perikanan tangkap tembus 111,33% di semester I 2024. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/lampaui-target-produksi-perikanan-tangkap-tembus-11133-di-semester-i-2024.html>

- Munir, M. (2025, Mei 12). Membangun kedaulatan pangan biru dengan sinergi ekonomi biru dan MBG. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4829301/membangun-kedaulatan-pangan-biru-dengan-sinergi-ekonomi-biru-dan-mbg>
- Putri, D. L., & Dzulfaroh, A. N. (2024, Februari 7). Ikan laut vs ikan tawar, mana yang lebih bergizi? *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/07/123000465/ikan-laut-vs-ikan-air-tawar-mana-yang-lebih-bergizi>
- *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. (2012).
- Widiyatmaka, A. (2025, 27 Mei). Untuk mencegah eksploitasi KKP jalankan misi hilirisasi. *Koran-Jakarta.com*, <https://koran-jakarta.com/2025-05-27/untuk-mencegah-eksploitasi-kkp-jalankan-misi-hilirisasi>
- World Bank. (2017). *The potential of blue economy. Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. World Bank.

